

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi, untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Marini, 2016). Pembangunan ekonomi awalnya diartikan sebagai upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau sering disebut pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara maka masalah terkait kemiskinan dapat teratasi sehingga terbentuklah negara yang adil dan makmur dari segi ekonomi (Wibowo, 2014).

Sustainable Development Goals (SDGs) dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), inklusivitas, dan antidiskriminasi. *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak hanya berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan masa sekarang saja, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masa yang akan datang atau berkelanjutan, serta ditujukan untuk memastikan bahwa manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera, kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi selaras dengan alam atau lingkungan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga dirancang untuk mendorong perdamaian agar terwujud masyarakat adil dan bebas dari rasa takut dan kekerasan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan Nasional tahun 2014 sebesar 11,25 persen, tahun 2015 sebesar 11,22 persen, tahun 2016 sebesar 10,86 persen, tahun 2017 sebesar 10,64 persen, dan tahun 2018 sebesar 9,82 persen. Sedangkan persentase kemiskinan Jawa Timur tahun 2014 sebesar 12,42 persen, tahun 2015 sebesar 12,34 persen, tahun 2016 sebesar 12,05, tahun 2017 sebesar 11,77, dan tahun 2018 sebesar 10,98. Kemiskinan Jawa Timur dan kemiskinan nasional pada tahun 2014 sampai 2018 cenderung mengalami penurunan. Namun, kemiskinan Provinsi Jawa Timur selalu berada diatas kemiskinan nasional. Dengan demikian, permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur merupakan isu sentral, yang artinya pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur harus lebih diperhatikan untuk menurunkan kemiskinan di Jawa Timur dibandingkan dengan kemiskinan nasional. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, terutama untuk pembangunan ekonomi. Kebijakan Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil, hal tersebut dikarenakan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi dengan persentase diatas 10%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan sebagai faktor yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan (Aminah, 2019). Menurut Bastian (2006: 52), sektor yang perlu mendapat perhatian serius adalah sektor pendidikan, mengingat pengelolaan sektor ini membutuhkan perspektif jangka panjang. Sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia agar mampu mengolah sumber daya alam secara optimal untuk kemajuan daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah

Kabupaten/Kota memiliki wewenang seluas-luasnya untuk mengembangkan sektor pendidikan. Pendidikan sangat penting dan bermakna bagi seseorang guna menggapai masa depan yang cerah dan baik. Maka dari itu pendidikan diberikan semenjak dini pada seseorang, baik berupa pendidikan formal maupun informal (Suputra & Dewi, 2015).

Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi warga, tanpa terkecuali. Hak yang sama dalam memperoleh pendidikan berarti tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya dalam memperoleh pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa : (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Pendidikan tanpa biaya yang memadai tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Wibowo, 2014).

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pendidikan yang dapat menunjang segala aktivitas pendidikan baik formal maupun informal. Pembiayaan menjadi komponen pendidikan yang mempunyai peran penting atas berjalannya proses pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan yang didukung dengan pembiayaan memadai akan berakibat pada berlangsungnya pembelajaran yang maksimal (Masditou, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut Bastian (2006: 90), Secara umum, pendanaan pendidikan di sekolah dapat berasal dari tiga sumber, yakni pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), yang biasanya masuk dalam pos pendapatan hanya sumbangan pendidikan yang diberikan secara triwulan (DPP), bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang gedung atau uang pangkal, dan dana sukarela yang berasal dari orang tua siswa.

Berdasarkan hasil penelitian Suputra & Dewi (2015), menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang. Semakin tinggi kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang, sehingga produktivitasnya akan ke arah yang lebih baik, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Herman (2018), menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tidak berpengaruhnya tingkat pendidikan dalam hal ini bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak akan bisa menjamin mengurangi jumlah penduduk miskin.

Menurut Wibowo (2014), menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Pembiayaan pendidikan bertujuan untuk memperlancar dan meratakan proses penyelenggaraan

pendidikan. Hal tersebut akan mempermudah upaya peningkatan sumber daya manusia yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, semakin tingginya pembiayaan pendidikan maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Berdasarkan hasil penelitian Megawati & Sebayang (2018), menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan meningkat tetapi tidak diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah dalam penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah pembiayaan pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji atau membuktikan pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji atau membuktikan pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Sebagai tambahan referensi mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan pembiayaan pendidikan di Provinsi Jawa Timur.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah wawasan tentang tingkat pendidikan dan pembiayaan pendidikan di Provinsi Jawa Timur.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai acuan dalam penelitian yang sama, sehingga hasil penelitian tersebut akan lebih sempurna.